



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktifitas sektor tertentu sampai ke tingkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak dan diatur dengan Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 7);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2020.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur pemberian stimulus PBB P2 kepada Wajib Pajak di Daerah.
  - (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah pengaturan pemberian stimulus PBB P2 untuk meringankan beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP bumi dan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Ketentuan PBB P2 yang harus dibayar tahun 2020 dihitung berdasarkan NJOP tahun 2019.
  - (2) Besaran stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar selisih antara pajak terhutang PBB P2 tahun 2020 dengan PBB P2 yang harus dibayar tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Contoh simulasi pemberian stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 8, setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Pengurangan karena sebab tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB P2 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku.
- (2) SPPT PBB P2 yang baru terbit di tahun 2020 akibat pendaftaran baru atau mutasi objek pajak, maka perhitungan NJOP dan stimulus berdasarkan zona nilai tanah objek PBB P2 terdekat dan sesuai dengan kondisi objek pajak tersebut.

- (3) Terhadap pelunasan pembayaran PBB P2 yang dilakukan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku, terikat pada ketentuan pemberian stimulus sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, oleh karena itu tidak dapat diajukan permintaan kelebihan pembayaran.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemberian stimulus PBB P2 dalam rangka penanganan dampak ekonomi sebagai akibat dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berlaku mulai 1 Mei 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 April 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN TAHUN 2020

CONTOH SIMULASI PEMBERIAN STIMULUS

Ketetapan Tahun 2019

|   |  |           |                       |                                  |             |  |   |
|---|--|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|--|---|
| NOP : <input type="text" value="33"/> <input type="text" value="75"/> <input type="text" value="020"/> <input type="text" value="007"/> <input type="text" value="000"/> <input type="text" value="0000"/> <input type="text" value="0"/> |  |           |                       |                                  |             |  | Tahun Pajak : <input type="text" value="2019"/> |
| Letak Objek Pajak : <input type="text" value="JL HAYAM WURUK"/>   |  |           |                       | Nama WP : <input type="text"/>   |             |  |   |
| RT/RW : <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |           |                       | Alamat WP : <input type="text"/> |             |  |   |
|   |  |           |                       | Persil : <input type="text"/>    |             |  |   |
|   |  | Luas (m2) | Kelas                 | NJOP Per M2                      | Total NJOP  |  |   |
| Bumi  |  | 220       | 055                   | 2,508,000                        | 551,760,000 |  |   |
| Bangunan  |  | 214       | 022                   | 968,000                          | 207,152,000 |  |   |
| Bumi *  |  | 0         | 000                   | 0                                | 0           |  |   |
| Bangunan *  |  | 0         | 000                   | 0                                | 0           |  |   |
| Jumlah NJOP Bumi  |  |           |                       |                                  | 551,760,000 |  |   |
| Jumlah NJOP Bangunan  |  |           |                       |                                  | 207,152,000 |  |   |
| NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB  |  |           |                       |                                  | 758,912,000 |  |   |
| BTKP / NJOPTKP  |  |           |                       |                                  | 0           |  |   |
| Nilai Jual Kena Pajak   |  |           |                       |                                  | 0           |  |   |
| Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang   |  |           |                       |                                  | 758,912     |  |   |
| Faktor Pengurang  |  |           |                       |                                  | 0           |  |   |
| Pajak Bumi dan Bangunan Yang Harus Dibayar  |  |           |                       |                                  | 758,912     |  |   |
| Denda Yang Telah Dibayar  |  |           |                       |                                  | 0           |  |   |
| Pajak Bumi dan Bangunan Yang Telah Dibayar  |  |           |                       |                                  | 758,912     |  |   |
| Selisih   |  |           |                       |                                  | 0           |  |   |
| Tanggal Jatuh Tempo/Tempat Pembayaran   |  |           | 30 - SEPTEMBER - 2019 | BANK JATENG CAB. PKL             |             |  |   |

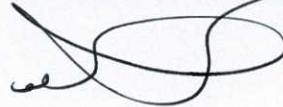
Ketetapan Tahun 2020

|   |  |           |                     |                                  |               |  |   |
|---|--|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|--|---|
| NOP : <input type="text" value="33"/> <input type="text" value="75"/> <input type="text" value="020"/> <input type="text" value="007"/> <input type="text" value="000"/> <input type="text" value="0000"/> <input type="text" value="0"/> |  |           |                     |                                  |               |  | Tahun Pajak : <input type="text" value="2020"/> |
| Letak Objek Pajak : <input type="text" value="JL HAYAM WURUK"/>   |  |           |                     | Nama WP : <input type="text"/>   |               |  |   |
| RT/RW : <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |           |                     | Alamat WP : <input type="text"/> |               |  |   |
|   |  |           |                     | Persil : <input type="text"/>    |               |  |   |
|   |  | Luas (m2) | Kelas               | NJOP Per M2                      | Total NJOP    |  |   |
| Bumi  |  | 220       | 043                 | 6,805,000                        | 1,497,100,000 |  |   |
| Bangunan  |  | 214       | 022                 | 968,000                          | 207,152,000   |  |   |
| Bumi *  |  | 0         | 000                 | 0                                | 0             |  |   |
| Bangunan *  |  | 0         | 000                 | 0                                | 0             |  |   |
| Jumlah NJOP Bumi  |  |           |                     |                                  | 1,497,100,000 |  |   |
| Jumlah NJOP Bangunan  |  |           |                     |                                  | 207,152,000   |  |   |
| NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB  |  |           |                     |                                  | 1,704,252,000 |  |   |
| BTKP / NJOPTKP  |  |           |                     |                                  | 0             |  |   |
| Nilai Jual Kena Pajak   |  |           |                     |                                  | 0             |  |   |
| Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang   |  |           |                     |                                  | 3,408,504     |  |   |
| Faktor Pengurang  |  |           |                     |                                  | 2,649,592     |  |   |
| Pajak Bumi dan Bangunan Yang Harus Dibayar  |  |           |                     |                                  | 758,912       |  |   |
| Denda Yang Telah Dibayar  |  |           |                     |                                  | 0             |  |   |
| Pajak Bumi dan Bangunan Yang Telah Dibayar  |  |           |                     |                                  | 0             |  |   |
| Selisih [ Kurang Bayar ]  |  |           |                     |                                  | 758,912       |  |   |
| Tanggal Jatuh Tempo/Tempat Pembayaran   |  |           | 31 - OKTOBER - 2020 | BANK JATENG CAB. PKL             |               |  |   |

Keterangan:

- Tahun 2020 terjadi kenaikan NJOP Bumi dan Bangunan dari Rp. 758.912.000,- menjadi Rp 1.704.252.000,-,
- PBB P2 terutang tahun 2020 sebesar Rp. 3.408.504,-
- PBB P2 yang harus dibayar tahun 2020 setelah diberikan stimulus menjadi Rp.758.912,- (Sama dengan PBB P2 yang harus dibayar tahun 2019)
- Stimulus (faktor pengurang) yang diberikan adalah selisih antara PBB P2 terutang tahun 2020 dengan PBB P2 yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 2.649.592,-

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ